

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2010-2018

¹Aris Adi Prasetyo, ²Virgiana Nugransih Siwi, ³Eranus Yoga Kudhani

^{1,2,3}Falkutas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana

Koresponden: virgiana.siwi@uksw.edu

Keywords:

Local Government Revenue (PAD);
Gross Regional Domestic Product (PDRB);
Inflation;
Total Population;
Number of Tourists;
Government Expenditure.

Kata Kunci:

Pendapatan Asli Daerah (PAD);
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
Inflasi;
Jumlah Penduduk;
Jumlah Wisatawan;
Pengeluaran Pemerintah.

ABSTRACT

Local Government Revenue (PAD) represents the ability of a regional government to organize and manage its own household affairs, which also shows the level of its regional autonomy. Therefore, the regional government can analyze what resources this regional has and factors which increase the PAD. Hence, the aim of this study is to examine factors that affect the PAD of 35 districts/cities in Central Java Province in 2010-2018. Empirically, the variables, Gross Regional Domestic Product (PDRB), inflation, population, number of tourists, number of workers and government expenditure, are used to explain the PAD. By using Fixed Effect model for panel data regression analysis, we found that the PDRB and government spending had a positive and significant effect on PAD, while inflation had a negative and significant effect on PAD. However, for the population and number of tourists did not significantly affect PAD

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai representasi otonomi daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri salah satunya dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi PAD dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2018. Secara empiris, studi dilakukan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, jumlah penduduk, jumlah wisatawan dan pengeluaran pemerintah terhadap PAD. Data yang digunakan adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Menggunakan Model Fixed Effect, ditemukan bahwa PDRB dan pengeluaran pemerintah secara signifikan berpengaruh positif terhadap PAD, sedangkan inflasi secara signifikan berpengaruh negatif terhadap PAD. Namun untuk jumlah penduduk dan jumlah wisatawan tidak berpengaruh terhadap PAD.

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD), berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber daya di daerahnya sendiri, yaitu hasil retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lainnya. PAD menjadi sumber pendanaan pelaksanaan otonomi daerah, oleh karena itu pengoptimalan PAD akan menunjang pembangunan daerah yang pembiayaannya bersumber dari PAD. Pada akhirnya, daerah tersebut dapat berkembang dan tidak lagi bergantung dengan pemerintah pusat.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, percepatan pembangunan menjadi prioritas setiap daerah seperti Jawa Tengah untuk menyambut Indonesia Maju 2024 (KPPIP, 2019). Dari hal ini, kota dan kabupaten setiap provinsi seperti di Jawa Tengah berperan juga dalam percepatan pembangunan tersebut. Pada tahun 2019, pemerintah pusat mulai memerintahkan Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan percepatan pembangunan ekonomi di mana setiap kota dan kabupaten juga berperan dalam percepatan pembangunan tersebut (Luhur, 2019). Dalam prosesnya, PAD akan menjadi sumber pendanaan dalam pembangunan ini dan diharapkan bahwa kota/kabupaten tidak bergantung pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, optimisasi PAD menjadi penting dan pemerintah Jawa Tengah dan kota/kabupaten di Jawa Tengah perlu mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi PAD sebagai dasar kebijakan mereka dalam pengoptimalan PAD. Selanjutnya, percepatan pembangunan tersebut dapat terwujud yang nantinya akan berdampak pada sektor lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi seperti Sektor Industri dan Sektor Pariwisata (Nugroho, 2019) dan terjadinya peningkatan jumlah lapangan usaha (Luhur, 2019) di Jawa Tengah.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, PAD dipengaruhi oleh PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto), inflasi, jumlah penduduk, jumlah wisatawan dan pengeluaran pemerintah. Dipengaruhinya PAD oleh PDRB disebabkan oleh meningkatnya kemampuan membayar masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah, yang pada akhirnya mempengaruhi peningkatan PAD (Santosa & Rahayu 2005). Sejalan dengan hasil Adriani & Handayani (2008); Aryanti & Indarti (2012); Gitaningtyas *et al* (2014); Henrikus (2016); Kumalawati (2016); Muchtholifah (2010) PDRB berpengaruh negatif terhadap PAD karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak Triani & Kuntari (2010).

Selain faktor PDRB, terdapat faktor lain yang dapat meningkatkan PAD yaitu jumlah penduduk. Doni (2018) menemukan jumlah penduduk berpengaruh positif apabila terjadi ketika peningkatan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) diikuti dengan peningkatan ide, peningkatan kualitas SDM yang mempunyai bakat dan kreativitas, dan peningkatan tenaga ahli, sehingga berdampak pada perkembangan teknologi, hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Gitaningtyas *et al* (2014); Henrikus (2016); Kumalawati (2016); Triani & Kuntari (2010). Penelitian yang berbeda ditemukan oleh Adriani & Handayani (2008), Jaya & Widanta (2014) jumlah

penduduk berpengaruh negatif terhadap PAD. Hal tersebut terjadi ketika jumlah penduduk bertambah tidak diiringi dengan persebaran, struktur dan mutu SDM maka akan mengurangi PAD. Penelitian yang berbeda dilakukan oleh Batik (2013) yang menyatakan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Lombok Barat dan Juliansyah & Sulkadria (2018) menemukan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Simeulue.

Kemudian, faktor selanjutnya adalah inflasi yang ditemukan berpengaruh negatif terhadap PAD oleh Muchtholifah (2010) dan Triani & Kuntari (2010). Penurunan PAD disebabkan oleh menurunnya konsumsi masyarakat akibat menurunnya pendapatan riil masyarakat. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aryanti & Indarti (2012) dan Muslim *et al* (2019) dimana inflasi tidak berpengaruh terhadap PAD. Hal ini dimungkinkan karena rendahnya tingkat inflasi sehingga tidak terlalu mempengaruhi konsumsi akan barang dan jasa yang berkontribusi pada PAD.

Faktor ketiga adalah pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap PAD karena pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah investasi atau pembelian aset dan pembangunan infrastruktur umum yang nantinya akan meningkatkan penerimaan PAD (Doni 2018; Mesra 2017). Berbeda dengan Kurniawan *et al* (2018), bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Kutai Barat, Prihartini (2017) menemukan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Mojokerto karena pengeluaran daerah tidak terkait dengan pelaksanaan program belanja pegawai dan belanja tidak terduga.

Selanjutnya, faktor yang terakhir adalah jumlah wisatawan. Suastika & Yasa (2017) menemukan pengaruh positif jumlah wisatawan terhadap PAD. Datangnya wisatawan akan memberikan pendapatan dari beberapa sektor yang berhubungan dengan PAD. Namun, Pertiwi (2014) menemukan jumlah wisatawan berpengaruh negatif terhadap PAD di Kabupaten Gianyar. Penurunan jumlah wisatawan yang terjadi di Kabupaten Gianyar direspon dengan kenaikan PAD. Sedangkan Purwanti & Dewi (2014) dan Widyaningsih & Budhi (2014) menemukan bahwa jumlah wisatawan tidak mempengaruhi PAD.

Berdasarkan latar belakang di atas bahwa pentingnya optimisasi PAD di kabupaten/kota di Jawa Tengah, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang dapat mengoptimalkan PAD kota/kabupaten di Jawa Tengah. Setelah mengetahui faktor-faktor tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada perumusan kebijakan dalam pengoptimalan PAD di kota/kabupaten Jawa Tengah. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan keempat faktor tersebut dalam satu model dan menggunakan tahun yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu tahun 2010-2018.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 ayat 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang didapat dari sumber pendapatan daerah yang terdiri dari penerimaan dari dinas-dinas, retribusi daerah, bagian laba BUMD, pajak daerah dan penerimaan lainnya BPS Provinsi Jawa Tengah (2019). Dengan otonomi daerah maka setiap daerah dapat memaksimalkan PAD melalui potensi yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri supaya tidak bergantung pada pemerintah pusat, sehingga tujuan pembangunan nasional yaitu mensejahterakan masyarakat setiap daerah secara merata dapat terwujud. Penerimaan pemerintah melalui PAD inilah yang nantinya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan penyelenggaraan pembangunan, dengan semakin banyaknya PAD yang diterima oleh pemerintah daerah maka pembangunan perekonomian suatu daerah akan semakin meningkat. Dalam hal ini bisa dilihat dari pengadaan prasarana dan sarana publik yang menunjang seperti penerangan jalan, jalan raya, fasilitas publik dan lain sebagainya. Berikut sumber PAD yang terdiri dari:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi badan kepada daerah yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung berdasarkan undang-undang yang berlaku. kemudian untuk membiayai pembangunan daerah dan pengelolaan. Maka dapat di katakan bahwa pajak daerah merupakan pendapatan yang diterima suatu daerah yang berasal dari pajak yang dibayarkan oleh para wajib pajak. Dalam pelaksanaan pajak daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian, seusai dengan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 2, komponen jenis pajak yang menjadi wewenang di level kota/kabupaten adalah:

Tabel 1. Jenis Pajak Kota/Kabupaten

Jenis Pajak	
Pajak Hotel	Pajak Parkir
Pajak Restoran	Pajak Air Tanah
Pajak Hiburan	Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Reklame	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Pajak Penerangan Jalan	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	

Sumber: UU No.28 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. Retribusi Daerah

Dasar hukum untuk mengatur pelaksanaan retribusi daerah dengan pajak daerah yaitu UU No.28 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang diperoleh daerah yang berasal dari retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat kepada daerah. Retribusi yang dimaksud antara lain Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan yaitu antara lain bagian dari laba dari BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekayaan daerah yang dipisahkan pengelolaannya diperoleh dari pengelolaan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendapatkan laba atas kepemilikan dari hasil pengelolaan kekayaan yang ada di daerahnya.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah penerimaan yang berasal dari luar retribusi daerah dan pajak daerah atau kelompok lain-lain milik pemerintah daerah yang sah. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan berupa denda pelaksanaan pekerjaan yang terlambat, penerimaan bunga dari deposito, penerimaan giro dan jasa dan kehilangan atau ganti rugi kekayaan daerah.

Pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap PAD

PDRB adalah nilai secara moneter seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi di regional tertentu dalam periode waktu tertentu (BPS, 2021). Di Indonesia, perhitungan PDRB dapat dihitung dari pengeluaran sektor riil dan berdasarkan Pendekatan Produksi. Dalam penelitian ini, PDRB yang digunakan adalah PDRB berdasarkan Pendekatan Produksi, yaitu nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh berbagai unit produksi pada wilayah suatu daerah dalam periode tertentu (BPS, 2021). Komponen industri dalam PDRB tersebut antara lain:

Tabel 2. Sembilan (9) Lapangan Usaha (Sektor) dalam PDRB

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
2. Pertambangan dan Penggalian	7. Pengangkutan dan Komunikasi
3. Industri Pengolahan	8. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	9. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.
5. Konstruksi	

Sumber: BPS (2021)

Kaitan PDRB Lapangan Usaha dengan PAD adalah barang dan jasa yang diproduksi dari setiap sektor tersebut (Tabel 2) dapat menjadi obyek pajak berdasarkan jenis pajak kota/kabupaten di Tabel 1. Oleh karena itu, semakin meningkatnya nilai tambah produksi dari tiap sektor tersebut, maka semakin tinggi pula jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah kota/kabupaten. Hal ini serupa dengan penelitian Lumy *et al.*, (2018) bahwa peningkatan PDRB memberikan dampak langsung terhadap PAD melalui sektor-sektor yang menjadi sumber sektor pajak. Selain itu, penerimaan pemerintah akan mendorong pelayanan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat sehingga meningkatkan produktivitas masyarakat yang berdampak dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi kembali. Sebaliknya ketika pendapatan perkapita masyarakat meningkat maka mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi lainnya.

Hasil penelitian Henrikus (2016), Aryanti & Indarti (2012), Susanto (2014) serupa dengan Lumy *et al.*, (2018) bahwa PDRB mempunyai pengaruh positif terhadap PAD melalui Sektor Hotel dan Restoran di Kota Semarang (Aryanti & Indarti, 2012) dan Kota Malang periode 1998-2012 (Susanto, 2014). Hal ini disebabkan karena peningkatan PDRB dari perkembangan usaha restoran, perdagangan dan hotel meningkatkan penerimaan pada retribusi daerah dan pajak daerah yang nantinya akan berpengaruh terhadap peningkatan PAD. Hasil penelitian ini sejalan juga dengan penelitian Adriani & Handayani (2008), Gitaningtyas *et al.*, (2014), Santosa & Rahayu (2005) dan Muhammad (2017)

Di sisi lain, Triani dan Kuntari (2010) menemukan hasil yang berbeda di Kabupaten Karanganyar dimana terdapat hubungan negatif antara PDRB dengan PAD. Hal ini disebabkan karena kontribusi pajak dan retribusi daerahnya terhadap PAD mengalami penurunan tiap tahunnya akibat rendahnya kepatuhan masyarakat kurang. Disaat kontribusi pajak dan retribusi daerah di PAD Kabupaten Karanganyar menurun, PDRB di Kabupaten Karanganyar meningkat tiap tahunnya.

H1: Pendapatan Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap PAD

Pengaruh Inflasi Terhadap PAD

Inflasi merupakan suatu fenomena dimana harga barang dan jasa secara umum meningkat terus menerus pada periode waktu tertentu. Peningkatan harga akan membuat pendapatan riil akan berkurang, dengan asumsi pendapatan tetap, sehingga mengurangi tingkat konsumsi masyarakat akan suatu barang dan jasa (Mankiw, 2020). Pengurangan konsumsi ini berdampak pula pada pengurangan penerimaan pajak dan retribusi atas barang dan jasa tersebut yang merupakan obyek pajak dan retribusi kota dan kabupaten. Hal ini serupa dengan hasil penelitian Muchtholifah (2010) di Kota Mojokerto, yang menyatakan inflasi memiliki hubungan negatif dengan PAD akibat perubahan pola konsumsi masyarakat yang sensitif terhadap perubahan harga. Lebih lanjut Triani & Kuntari (2010) menambahkan bahwa variabel makro, yaitu inflasi, berpengaruh negatif terhadap PAD Periode 2003-2007 di Kabupaten

Karanganyar. Sehingga, jika inflasi terlalu tinggi, maka peran pemerintah penting untuk mengendalikan angka inflasi tersebut.

Namun, berbeda Muchtholifah (2010) dan Triani & Kuntari (2010), dalam penelitian Susanto (2014) di Kota Malang tahun 1998–2012, inflasi tinggi tidak berpengaruh terhadap perolehan PAD. Hal ini dikarenakan tingkat upah yang didapatkan masyarakat akan menyesuaikan tingkat inflasi tersebut, sehingga pola konsumsi tidak terlalu mempengaruhi PAD. Selanjutnya, Muslim *et al* (2019) juga menemukan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap PAD karena barang atau jasa yang sensitif terhadap perubahan harga dan dikonsumsi oleh masyarakat adalah objek yang tidak terkena pajak yang langsung masuk ke daerah. Selanjutnya, Aryanti dan Indarti (2012) menambahkan dalam penelitiannya, bahwa inflasi tidak mempengaruhi PAD karena laju inflasi diperlukan dalam pertimbangan perubahan tarif yaitu dengan cara penetapan pada tarif pajak dan retribusi daerah yang bersifat tetap, meskipun tarif pajak dan retribusi yang ditetapkan tinggi atau rendah hal ini tidak berpengaruh terhadap penerimaan PAD. Hal serupa juga ditemukan oleh Miragustina dan Raja (2017) di Provinsi Aceh.

H2: Inflasi berpengaruh negatif terhadap PAD

Jumlah Penduduk Terhadap PAD

Keberadaan jumlah penduduk berkaitan dengan aktivitas perekonomian, yaitu produksi dan konsumsi. Semakin meningkatnya jumlah penduduk, terutama usia angkatan kerja, maka dimungkinkan semakin meningkatnya produksi akan barang dan jasa yang menggunakan mereka sebagai faktor produksi. Selanjutnya, penduduk tersebut akan mendapatkan pendapatan yang nantinya digunakan untuk konsumsi, sehingga pajak, retribusi dan lainnya dari barang dan jasa yang diproduksi tersebut menjadi pemasukan daerah/kota/kabupaten (Rokhmanasari 2018). Artinya, semakin meningkat jumlah penduduk, maka semakin tinggi pula tingkat realisasi PAD yang diterima. Hal ini serupa dengan penelitian Gitaningtyas *et al* (2014) di Provinsi Jawa Timur bahwa jumlah penduduk memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap PAD. Hasil serupa juga ditemukan oleh Adriani dan Handayani (2008), Asmuruf *et al.*, (2015), Santosa & Rahayu (2005) dan Susanto (2014), bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara jumlah penduduk dengan PAD.

Namun, Juliansyah dan Sulkadria (2018) menemukan hasil yang berbeda di Kabupaten Simeulue bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD. Meskipun jumlah penduduk meningkat, pendapatan masyarakat terlalu rendah sehingga tingkat konsumsi masyarakat akan barang dan jasa yang menjadi obyek pajak dan retribusi rendah. Oleh karena itu, peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Simeulue tidak mempengaruhi PAD. Di sisi lain, rendahnya permintaan agregat akan barang dan jasa akan mengurangi total produksi akan barang dan jasa tersebut. Selanjutnya akan terjadi pengurangan faktor produksi seperti tenaga kerja, sehingga menimbulkan pengangguran baru akibat pemecatan tenaga kerja. Hal ini sejalan

dengan penelitian Batik (2013) di Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan penelitian sebelumnya, hipotesis yang dibangun adalah:

H3: Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap PAD

Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap PAD

Jumlah wisatawan merupakan besarnya jumlah wisatawan asing dan domestik yang berkunjung ke seluruh objek wisata di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Masuknya wisatawan tersebut akan mengarah pada pembelian akan barang dan jasa di sektor wisata yang menjadi sektor pajak dan retribusi, sebagai contoh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Dalam penelitian Pertiwi (2014) dan Suastika & Yasa (2017), jumlah wisatawan berdampak positif terhadap PAD karena jumlah wisata yang berkunjung setiap tahunnya mengonsumsi barang dan jasa yang merupakan sektor pajak dan retribusi pemerintah kota/kabupaten seperti penginapan, rumah makan, jasa biro dan penjual cinderamata.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanti dan Dewi (2014) bahwa jumlah wisatawan tidak berpengaruh terhadap PAD. Hal ini dikarenakan, jumlah pengeluaran konsumsi dari wisatawan di Sektor Pariwisata hanya berkontribusi sedikit pada komponen PAD, oleh karena itu perubahan jumlah wisatawan yang masuk ke daerah tersebut tidak terlalu mempengaruhi PAD.

H4: Jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap PAD

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PAD

Pengeluaran Pemerintah adalah pengeluaran akan barang dan jasa akhir oleh pemerintah untuk pelayanan publik (McConnel, Brue, & Flynn, 2015). Pengeluaran ini antara lain pembangunan fisik seperti infrastruktur dan fasilitas umum, yang diharapkan akan meningkatkan kegiatan ekonomi (Doni, 2018), melalui peningkatan kegiatan produksi dan konsumsi. Melalui peningkatan kegiatan ekonomi ini, penerimaan pemerintah kota/kabupaten melalui komponen PAD akan meningkat karena peningkatan pengeluaran akan barang dan jasa obyek komponen PAD. Hal ini serupa dengan penelitian Mesra (2017) dimana pengeluaran pemerintah berdampak positif terhadap PAD di Provinsi DKI Jakarta melalui pengeluaran di investasi atau pembelian aset dan infrastruktur. Hal serupa juga ditemukan oleh Kurniawan (2017) di Kabupaten Kutai Barat 2004-2015 bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Berbeda dengan penelitian Kurniawan *et al* (2018) dan Prihartini (2017) dimana pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap PAD. Hal ini dikarenakan komponen anggaran dalam pengeluaran pemerintah terlalu banyak pada sektor konsumtif seperti belanja pegawai, belanja tidak terduga, subsidi, bantuan sosial dan belanja bagi hasil. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah tidak dapat memicu peningkatan di sektor produktif yang nantinya dapat meningkatkan PAD.

H5: Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap PAD.

METODE PENELITIAN

Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan data sekunder. Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel terikat, sedangkan PDRB, inflasi, jumlah penduduk, jumlah wisatawan dan pengeluaran pemerintah sebagai variabel bebas. Data-data tersebut merupakan data panel periode tahun 2010-2018 pada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Data tahun 2019 tidak disertakan karena tidak semua kota/kabupaten di Jawa Tengah sudah mempublikasikan data tersebut.

Bagian ini menjelaskan secara eksplisit tentang bagaimana penelitian ini dilakukan, penelitian harus ditulis dengan efektif sehingga penulis dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang data, alat dan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian dan dapat memudahkan untuk direplikasi.

Teknik Analisis

Model dalam Data Panel

Tahap pertama dalam regresi data panel adalah pemilihan model, yaitu antara *Pooled Model*, *Fixed Effect (FE) Model* dan *Random Effect (RE) Model*. *Pooled Model* merupakan regresi menggunakan *Ordinary Least Square (OLS) regression* dengan asumsi bahwa variasi dari waktu dan karakteristik individu adalah konstan. Sehingga, model persamaan di *Pooled Model* adalah sebagai berikut:

$$\ln PAD_t = \beta_{0,t} + \beta_1 \ln PDRB_t + \beta_2 \ln INFLASI_t + \beta_3 \ln JMLHPEND_t + \beta_4 \ln JMLHWIS_t + \beta_5 \ln G_t + \varepsilon_t \quad [1]$$

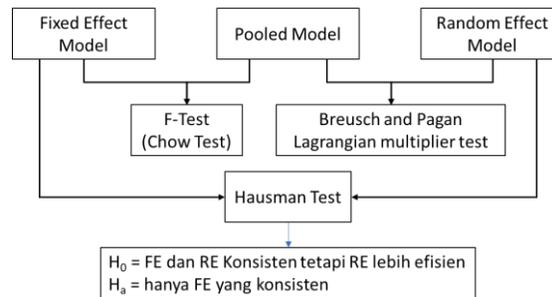
di mana $\beta_{0,it}$ adalah konstanta, i ($i=1, 2, \dots, 35$) adalah kota/kabupaten di Jawa Tengah, t ($t=2010, 2011, \dots, 2018$), α_{it} konstanta, β_k ($K=1,2,3,4,5$) adalah koefisien regresi dan ε_{it} sebagai *error term* di setiap model.

Selanjutnya, model FE mengansumsikan bahwa terdapat variasi dari waktu tetapi tidak pada karakteristik individu. Oleh karena itu, persamaan model 1 dan 2 berkembang menjadi:

$$\ln PAD_{it} = (\beta_{0,it} + u_{0,it}) + \beta_1 \ln PDRB_{it} + \beta_2 \ln INFLASI_{it} + \beta_3 \ln JMLHPEND_{it} + \beta_4 \ln JMLHWIS_{it} + \beta_5 \ln G_{it} + \varepsilon_{it} \quad [2]$$

Dimana $u_{0,i}$ disebut sebagai *individual (unobserved) heterogeneity* yang menunjukkan intersep acak pada model. Kemudian, ketika waktu dan karakteristik individu bervariasi, maka model data panel selanjutnya adalah RE Model dengan persamaan sebagai berikut:

$$\ln PAD_{it} = (\beta_{0,it} + u_{0,it}) + (\beta_1 + u_{1,it}) \ln PDRB_{it} + (\beta_2 + u_{2,it}) \ln INFLASI_{it} + (\beta_3 + u_{3,it}) \ln JMLHPEND_{it} + (\beta_4 + u_{4,it}) \ln JMLHWIS_{it} + (\beta_5 + u_{5,it}) \ln G_{it} + \epsilon_{it} \quad [3]$$



Gambar 1. Sistematika Pemilihan Model

dimana $u_{k,it}$ adalah koefisien acak.

Pemilihan Model Data Panel

Pertama, hasil dari *Pooled Model* dibandingkan dengan FE Model dan RE Model menggunakan *Chow Test* dan *Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test* untuk menentukan apakah *Pooled Model* merupakan model yang tepat atau tidak (lihat Gambar 1).

Chow Test

$H_0: u_1 = u_2 = \dots = u_{35} = 0$ (Pooled Effect Model)

$H_1: \text{Minimal ada satu } u_i \neq 0 ; i = 1, 2, \dots, 35$ (Fixed Effect Model)

Jika nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi 5 persen, maka Fixed Effect Model merupakan model yang tepat.

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test

$H_0: \sigma_u^2 = 0$ (Pooled Model)

$H_1: \sigma_u^2 \neq 0$ (Random Effect Model)

Jika nilai probabilitas *Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test* lebih kecil dari tingkat signifikansi 5 persen, maka Random Effect Model merupakan model yang tepat.

Hausman Test

$H_0: E[u | X_{i2010}, \dots, X_{i2018}] = 0$ FEM dan REM konsisten tetapi REM lebih efisien.

$H_1: E[u | X_{i2010}, \dots, X_{i2018}] \neq 0$ hanya FE yang konsisten.

Jika nilai probabilitas dari *Hausman Test* lebih kecil dari tingkat signifikansi 5 persen, maka Random Effect Model merupakan model yang tepat.

Uji Asumsi Klasik

Setelah dilakukannya pemilihan model, uji asumsi klasik dilakukan agar model menjadi konsisten atau tidak bias. Uji yang pertama adalah Uji Multikolinearitas untuk menguji apakah ada korelasi kuat antar variabel bebas di dalam model. Uji yang digunakan adalah Uji Korelasi Pearson, kemudian selama nilai dari koefisien korelasi tidak lebih dari sama dengan 0,8 maka model tersebut bebas dari masalah multikolinearitas. Selanjutnya, uji normalitas dilakukan menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov di mana ketika nilai probabilitas dalam uji tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 5 persen, maka error dapat dikatakan berdistribusi normal.

Kemudian, dalam penelitian ini tidak dilakukan uji stasioneritas dikarenakan jumlah unit *time series* ($T=9$) dan jumlah unit *cross section* ($N=35$) kurang dari interval 10 dan 250 dan jumlah N lebih besar dibanding. T. Levin, Lin, dan Chu (2002) menyatakan bahwa pengujian stasioneritas penting dilakukan pada saat jumlah N (*unit cross section*) dan T (*time series*) berada dalam interval 10 dan 250, atau ketika T (*time series*) sangat besar, meskipun N (*cross section*) sangat kecil, karena pada uji stasioneritas sangat berhubungan dengan T (*time series*). Selanjutnya, uji heteroskedastisitas tidak dilakukan karena dalam penelitian ini sudah menggunakan regresi *robust standard error*. Regresi robust bisa menganalisis suatu data tanpa membuang outlier dan menghasilkan estimasi yang tahan terhadap outlier (Pratiti & Listyani 2016).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Data dan Deskripsi Statistik Data

Tabel 3. Ringkasan Statistik Data

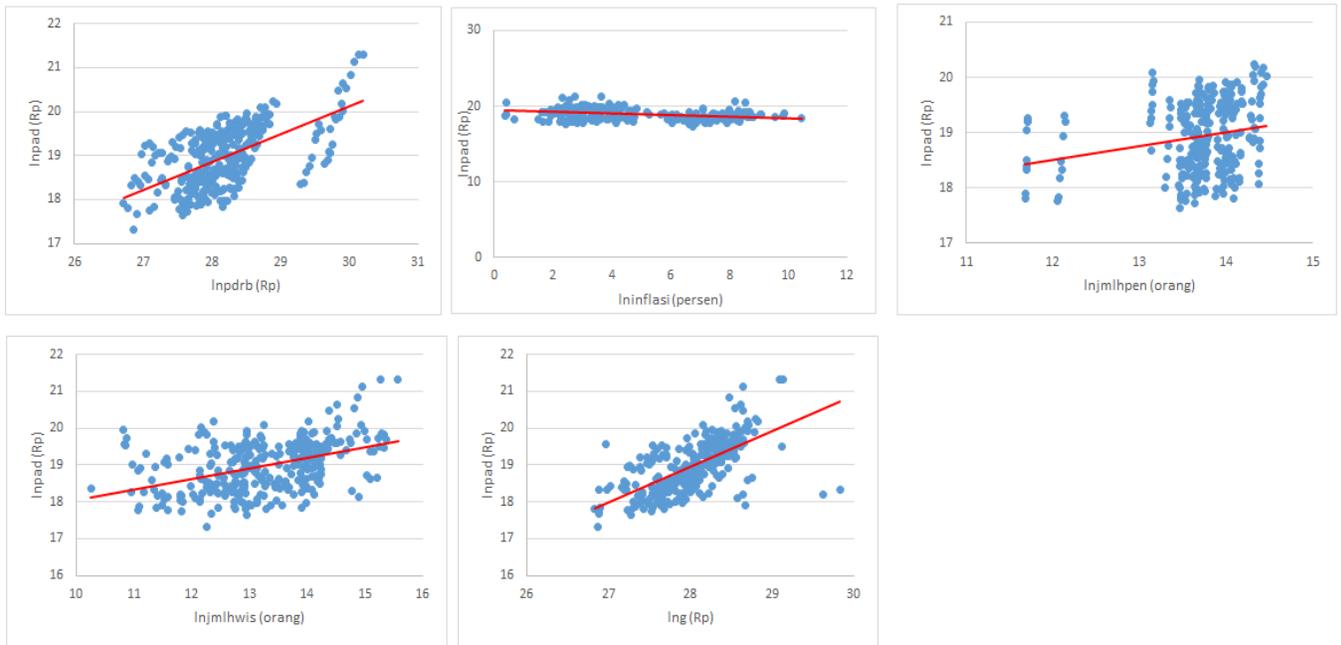
	Variabel	N	Rata-rata	Std. Dev.	Min.	Maks.
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto harga konstan menurut lapangan usaha di kabupaten/kota di Jawa Tengah secara umum dan skala rasio (Triliun)	315	2,21	2,10	0,401	13,13
INFLASI	Indeks Harga Konsumen di kabupaten/kota di Jawa Tengah dan skala rasio (persen)	315	4,62	2,31	0,37	10,46
JMLHPEND	Total jumlah penduduk yang tinggal di kabupaten/kota di Jawa Tengah dan skala rasio (juta orang)	315	961,52	410,98	0.118	190,68
JMLHWIS	Jumlah wisatawan yang berkunjung di kabupaten/kota di Jawa Tengah dan skala rasio (ribu orang)	313	928,34	955,78	28,70	5.769,34

	Variabel	N	Rata-rata	Std. Dev.	Min.	Maks.
G	Pengeluaran yang dilakukan kabupaten/kota di Jawa Tengah membangun infratraktur dan skala rasio (triliun rupiah)	315	1,66	0,86	0,45	9,03
PAD	Penerimaan yang didapat dari sumber pendapatan daerah dan skala rasio (triliun rupiah)	315	0,22	0,20	0,03	1.79

Sumber : Badan Pusat Statistik (2019), diolah

Berdasarkan Tabel 3 di atas, Kota Magelang merupakan daerah yang memiliki nilai PDRB dan jumlah penduduk terkecil, Rp.401 Miliar dan 118 ribu jiwa pada tahun 2010. Kemudian, jumlah penduduk tertinggi sebanyak 1.906 juta jiwa di Kab. Cilacap pada tahun 2018. Sedangkan Kota Semarang memiliki nilai PDRB, jumlah wisatawan, pengeluaran pemerintah tertinggi tahun 2018 dan PAD tahun 2017 yang mencapai Rp.13.131 triliun, 5.77 juta wisatawan, Rp.9,03 triliun dan Rp.1.79 trilliun. Inflasi terendah, yaitu 0.37 persen, terdapat di Kota Sragen pada tahun 2012, selanjutnya yang tertinggi, yaitu 10,46 persen, terdapat di kota Kebumen tahun 2013.

Selanjutnya, dari Gambar 2 dapat diketahui bahwa variabel PDRB, jumlah penduduk, jumlah wisatawan dan pengeluaran pemerintah mempunyai korelasi yang positif terhadap PAD dengan model log-log, sedangkan variabel inflasi mempunyai korelasi yang negatif terhadap PAD dengan model lin-log.



catatan: ln: Logaritma, pad: Pendapatan Asli Daerah, PDRB: Produk Domestik Regional Bruto, Jmlhpen: Jumlah Penduduk, Jmlhwis: Jumlah Wisatawan, g: Pengeluaran Pemerintah

Sumber : Badan Pusat Statistik (2019), diolah

Gambar 2. Scatter Plot Variabel Bebas dengan Variabel Terikat (PAD)

Hasil Pemilihan Model dan Uji Asumsi Klasik

Model yang digunakan untuk menemukan pengaruh PDRB, Inflasi, Jumlah Wisatawan dan Pengeluaran Pemerintah terhadap PAD adalah Fixed Effect Model (FE) dengan persamaan nomor [2]. Hasil *Chow Test* dan *Breusch Pagan Test* pada Tabel 4 menunjukkan bahwa Pooled Model bukan model yang terbaik. Kemudian, hasil *Hausman Test* pada Tabel 4 menunjukkan bahwa FE Model adalah model yang terbaik dibandingkan RE Model. Selanjutnya, Model FE ini telah lolos uji normalitas (lihat Tabel 5) dan uji multikolinearitas (lihat Tabel 6).

Tabel 4. Hasil Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel

Nama Uji	P-Value
F-Test (Chow Test)	0.000***
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test	0.000***
Hausman Test	0.000***

Catatan: *** adalah tingkat signifikansi 1 persen.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov

	P-value
RES2:	0.696
Cumulative	0.474
Combined K-S	0.849

Tabel 6. Koefisien Korelasi Pearson Antar Variabel Bebas

	PDRB	INFLASI	JMLHPEND	JMLHWIS	G
PDRB	1.0000				
INFLASI	-0.0695	1.0000			
JMLHPEND	0.6627	0.0200	1.0000		
MLHWIS	0.3188	-0.0629	0.2106	1.0000	
G	0.5917	-0.1879	0.6320	0.3914	1.0000

Catatan: koefisien korelasi <0.8 yang menunjukkan tidak adanya multikolinearitas di dalam model.

Berdasarkan hasil regresi Fixed Effect Model pada Tabel 7, terbukti bahwa PDRB dan Inflasi secara signifikan mempengaruhi PAD pada tingkat signifikansi 1 persen. Pengeluaran pemerintah dan jumlah wisatawan juga terbukti secara signifikan mempengaruhi PAD pada tingkat signifikansi 5 persen dan 10 persen, berturut-turut. Sedangkan jumlah penduduk terbukti tidak signifikan mempengaruhi PAD. Kemudian, nilai R^2 menunjukkan bahwa kelima variabel bebas tersebut dapat menjelaskan PAD Kota/Kabupaten di Jawa Tengah sebesar 89,4 persen.

Tabel 7. Hasil Regresi FE

Variabel Terikat: PAD (ln)			
Variabel Bebas	Koefisien	Robust Std. Err.	t
PDRB (ln)	3.320 (0.000)***	0.179	18.59
INFLASI	-0.015 (0.000)***	0.004	-4.31
JMLHWIS (ln)	0.058 (0.095)*	0.034	1.72
JMLHPEN (ln)	0.639 (0.198)	0.486	1.31
G (ln)	0.127 (0.043)**	0.060	2.11
Konstanta	-87.549 (0.000)***	5.569	-15.72
N	313		
R^2	0.894		
AR^2	0.892		

Catatan: di dalam kurung adalah nilai p-value dari uji t. *, **, *** adalah tingkat signifikansi 10, 5 dan 1 persen berturut-turut.

Pengaruh PDRB Terhadap PAD

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 7, setiap kenaikan PDRB sebesar 1 persen akan meningkatkan PAD sebesar 3,32 persen. PDRB memiliki pengaruh terhadap PAD melalui sektor-sektor lapangan usaha yang memberikan kontribusi pajak dan retribusi daerah. Terjadinya pertumbuhan ekonomi menunjukkan semakin meningkatnya pengeluaran masyarakat di daerah tersebut. Dari sisi produsen, peningkatan permintaan konsumen akan produknya dapat mendorong produsen untuk mempromosikan produknya melalui reklame, sehingga pajak reklame dapat meningkat. Selain itu, peningkatan pengeluaran dari lapangan usaha dapat meningkatkan PAD melalui kegiatan produksi sektor-sektor tersebut yang berhubungan dengan retribusi dan pajak kota/kabupaten. Pada tahun 2018, di Jawa Tengah, industri pengolahan telah memberikan kontribusi pajak tertinggi sebesar Rp.15 triliun (41.95 persen), diikuti dengan Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor yang mencapai Rp.7 triliun (17.93 persen).



Sumber: BPS, 2020

Grafik 1 Proporsi Realisasi Penerimaan Pajak Jawa Tengah di 3 Sektor Lapangan Usaha Tahun 2016-2018

Sesuai dengan penelitian Adriani & Handayani (2008), Aryanti & Indarti (2012), Gitaningtyas *et al* (2014), Henrikus (2016), Muhammad (2017), Santosa & Rahayu (2005) dan Susanto (2014), PDRB berpengaruh positif terhadap PAD yang dapat disebabkan dari perkembangan usaha restoran, sektor lapangan usaha dan hotel. Peningkatan sektor usaha tersebut dapat meningkatkan PAD melalui Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. Hal ini mendukung kebijakan pemerintah Jawa Tengah yang meningkatkan pembangunan ekonomi di Sektor Industri dan Wisata.

Pengaruh Inflasi Terhadap PAD

Selanjutnya, inflasi terbukti secara signifikan berpengaruh negatif terhadap PAD. Jika tingkat inflasi meningkat 1 persen, maka PAD akan menurun sebesar 0.015 persen. Inflasi mempunyai pengaruh negatif terhadap PAD karena inflasi dapat menurunkan tingkat konsumsi barang dan jasa yang kena retribusi dan pajak daerah. Hasil penelitian ini sama dengan Muchtholifah (2010) dan Triani & Kuntari (2010), yaitu masyarakat akan mengubah pola

konsumsinya sebagai respon atas perubahan harga. Rendahnya pengaruh inflasi akan PAD dapat disebabkan barang atau jasa yang dikonsumsi adalah objek pajak yang tidak langsung masuk ke daerah.

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap PAD

Pada Tabel 7, jumlah penduduk tidak signifikan mempengaruhi PAD. Tidak berpengaruhnya jumlah penduduk terhadap PAD diduga karena salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebagai contoh, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tercatat di Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah pada semester satu tahun 2014 hanya mencapai 0.33 persen atau Rp.183 juta, lebih kecil dari tahun 2013, meskipun sudah dibukanya pembayaran secara elektronik.

Hasil ini serupa dengan Batik (2013), Jatmiko & Gilar (2019), dan Juliansyah & Sulkadria (2018). Dalam penelitiannya, jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD dapat disebabkan rendahnya pendapatan masyarakat. Rendahnya pendapatan membuat permintaan agregat atas barang rendah yang berdampak pada perusahaan akan mengurangi total produksinya dan mengurangkan tenaga kerjanya, sehingga peningkatan jumlah penduduk tidak meningkatkan PAD.

Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap PAD

Jumlah wisatawan juga terbukti signifikan berpengaruh positif terhadap PAD pada tingkat signifikansi 10 persen. Artinya, setiap peningkatan satu persen jumlah wisatawan yang masuk di kota/kabupaten Jawa Tengah, akan meningkatkan PAD sebesar 0,058 persen. Meskipun signifikan mempengaruhi, pengaruh dari jumlah wisatawan relatif paling kecil, dibandingkan dengan variabel lainnya. Hal ini dapat dimungkinkan karena tidak semua kota/kabupaten memiliki potensi di Sektor Pariwisata, seperti yang terlihat dalam Grafik 1, bahwa realisasi pajak dari Sektor Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi relatif kurang dari 0,1 persen pada tahun 2016-2018. Sehingga perubahan jumlah kunjungan wisatawan, seperti yang terjadi pada tahun 2016 hingga tahun 2018 sebesar 1.944 kunjungan (Nurdin, 2016), 78.107 orang dan 677.168 orang (Saputra, 2019) berturut-turut, tidak terlalu mempengaruhi penerimaan PAD.

Hasil ini sesuai dengan penemuan Purwanti & Dewi (2014) dan Widyaningsih & Budhi (2014). Dalam penelitiannya, jumlah wisatawan belum tentu mengeluarkan banyak uang untuk konsumsi di tempat tersebut, maka tidak akan menambah jumlah pendapatan daerah yang dikunjungi.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PAD

Selanjutnya, pengeluaran pemerintah terbukti secara signifikan mempengaruhi PAD, yaitu setiap kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar satu persen akan meningkatkan PAD sebesar 0,127 persen. Salah satu pengeluaran pemerintah adalah untuk pengoptimalan infrastruktur dan investasi. Keberadaan infrastruktur yang memadai dapat mendukung aktivitas ekonomi di kota/kabupaten. Jawa Tengah, sebagai contoh pengadaan Tol Trans Jawa yang dapat menghubungkan distribusi di sentra-sentra produksi khususnya Sektor Industri (Hafiyyan, 2019). Akses yang mudah dan infrastruktur yang memadai dapat menekan biaya, khususnya biaya transportasi, sehingga perdagangan dapat berjalan dengan lancar. Hal inilah yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor produktif dapat meningkatkan penerimaan dari retribusi dan pajak daerah di setiap kota/kab di Jawa Tengah. Hasil ini serupa dengan penelitian Doni (2018), Kurniawan *et al* (2018), dan Mesra (2017) bahwa pengeluaran pemerintah di sektor produktif dapat meningkatkan PAD, sebagai contoh infrastruktur.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi PAD dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010-2018 terbukti bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara PDRB, pengeluaran pemerintah dan jumlah wisatawan terhadap PAD 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dan inflasi secara signifikan berpengaruh negatif terhadap PAD. Sedangkan jumlah penduduk terbukti tidak signifikan mempengaruhi PAD 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Dari seluruh faktor yang secara signifikan mempengaruhi PAD, PDRB merupakan faktor yang memiliki pengaruh paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan sektor-sektor sangat penting untuk dapat meningkatkan PAD kota/kabupaten di Jawa Tengah. Hal pertama yang perlu dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten adalah memahami sektor apa yang unggul dan berpotensi untuk dikembangkan dalam jangka panjang. Setelah itu, pemerintah perlu menetapkan kebijakan apa yang tepat dalam pengembangan sektor tersebut. Akhirnya, pengembangan sektor tersebut dapat menjadi input untuk pengembangan sektor lain dan terciptanya pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kegiatan produksi dan konsumsi akan barang dan jasa yang menjadi obyek dari PAD akan meningkat dan berdampak pada meningkatkan PAD.

Meskipun inflasi memiliki pengaruh kecil terhadap PAD, pengendalian inflasi tetap dilakukan terutama pada sumber inflasi pada kebutuhan pokok, seperti beras, daging dan gula karena kebutuhan primer dengan begitu konsumsi masyarakat tetap stabil. Kemudian, pemerintah kota/kabupaten perlu mengoptimalkan pengeluaran pemerintah pada sektor produktif untuk menggerakkan aktivitas perekonomian yang nantinya juga berkontribusi pada PAD kota/kabupaten.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah mayoritas variabel makroekonomi. Pada penelitian selanjutnya, disarankan penggunaan variabel di sektor produktif seperti investasi dan jumlah perusahaan di kota/kabupaten di Jawa Tengah. Dari hasil tersebut diharapkan dapat menggambarkan pentingnya meningkatkan investasi dan jumlah perusahaan pada kota/kabupaten di Jawa Tengah, yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi atau pengurangan jumlah pengangguran, tetapi juga peningkatan PAD kota/kabupaten sebagai wujud otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, E., & Handayani, S. I. (2008). Pengaruh PDRB Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 8(2), 1–6.
- Aryanti, E. N. I., & Indarti, I. I. N. (2012). Pengaruh Variabel Makro Terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2000-2009 di Kota Semarang. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1), 33–47.
- Asmuruf, F., Rumat, V. A., & Kawung, G. M. V. (2015). Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmu Efesien*, 15(05), 727–737.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Badan Pusat Statistika.
- Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah. (2018). *BPS Provinsi Jawa Tengah*. <https://doi.org/1102001.33>
- Batik, K. (2013). Analisis Pengaruh Investasi, PDRB, Jumlah Penduduk, Penerimaan Pembangunan dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11.
- BPS. (2020). Realisasi Penerimaan Pajak Jawa Tengah Menurut Klasifikasi Lapangan Usaha. Retrieved April 22, 2021, from Badan Pusat Statistik Jawa Tengah website: <https://jateng.bps.go.id/statictable/2021/04/08/2208/realisasi-penerimaan-pajak-jawa-tengah-menurut-klasifikasi-lapangan-usaha-juta-rupiah-2018---2020.html>
- BPS. (2021). Produk Domestik Bruto (Lapangan Usaha). Retrieved from Produk Domestik Bruto (Lapangan Usaha)
- Doni, F. U. (2018). Analysis of Influencing Factors Regional Original Revenue (Pad) in The Provincial Government of Dki Jakarta. *Indonesian Journal of Business, Accounting and Management*, 1(1). <https://doi.org/10.36406/ijbam.v1i1.220>
- Gitaningtyas, Kurniawati, Y., & Kurrohman, T. (2014). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan Investasi Swasta Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Ilmiah Mahasiswa 2014.*, 1–7.
- Hafiyyan. (2019). Sektor Infrastruktur Dorong Pertumbuhan Jateng. *Bisnis.Com*. Retrieved from <https://semarang.bisnis.com/read/20190813/536/1136048/sektor-infrastruktur-dorong-pertumbuhan-jateng>
- Henrikus, T. (2016). PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Kota Banjarmasin 2012 - 2016. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 1(3), 1–16.
- Jatmiko, B., & GilarWicaksono, I. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara (Studi Deskriptif Pada Kabupaten Banjarnegara-Jawa

- Tengah). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 0832(33), 157–174. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23105/jat.v6i2.5580>
- Juliansyah, H., & Sulkadria. (2018). Pengaruh Total Penduduk Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simeulue. *Jurnal Ekonomi Unimal*, 01, 58–64.
- KPPIP. (2019). Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Menyambut Indonesia Maju 2024. Retrieved from Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas website: <https://kppip.go.id/berita/percepatan-pembangunan-infrastruktur-untuk-menyambut-indonesia-maju-2024/>
- Kumalawati, E. (2016). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Daerah Istimewa Yogyakarta. *British Journal of Psychiatry*, 205(01), 76–77. <https://doi.org/10.1192/bjp.205.1.76a>
- Kurniawan, A. I., Militina, T., & Suharto, R. B. (2018). Pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah serta tenaga kerja terhadap pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Fakultas Ekonomi Mulawarman*, 13(2), 82. <https://doi.org/10.29264/jinv.v13i2.2453>
- Kurniawan dan Nur Hayati. (2015). Penerapan Model Solow - Swan untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Demak. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 30(1), 1–8.
- Levin, A., Lin, C. F., & Chu, C. S. J. (2002). Unit root tests in panel data: Asymptotic and finite-sample properties. *Journal of Econometrics*, 108(1), 1–24. [https://doi.org/10.1016/S0304-4076\(01\)00098-7](https://doi.org/10.1016/S0304-4076(01)00098-7)
- Luhur, P. A. (2019). BPPD Jateng Optimalkan PAD Capai Pertumbuhan 7 Persen. *Suara Merdeka*. Retrieved from <https://www.suaramerdeka.com/news/ekonomi-dan-bisnis/195106-bppd-jateng-optimalkan-pad-capai-pertumbuhan-7-persen>
- Lumy, D. G., Kindangen, P., & Engka, D. S. M. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(6), 1–16.
- Mankiw, N. G. (2020). *Principles Of Economics* (9th ed.). Cengage Learning, Inc.
- Mayza Miragustina, Masbar Raja, N. M. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Ekonomi*, 3(1), 9–16.
- McConnel, C. R., Brue, S. L., & Flynn, S. M. (2015). *MACROECONOMICS: PRINCIPLES, PROBLEMS, AND POLICIES* (21st ed.). Mc Graw Hill Education.
- Mesra. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Manajemen Tools*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Muchtholifah. (2010). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Inflasi, Investasi Industri dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap PAD Kota Mojokerto. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 90–99.
- Muhammad, A. surya. (2017). Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Ekonomi (Fekon)*, 4(1), 898–913.
- Muslim, C., Mallongi, S., & Rahman, Z. (2019). Pengaruh PDRB , Jumlah Penduduk dan Tingkat Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(3).
- Nugroho, W. A. (2019, July 10). Ganjar Usulkan 12 Program Pembangunan Tingkatkan Perekonomian Jateng. *Antara*. Retrieved from <https://www.antaraneews.com/berita/949129/ganjar-usulkan-12-program-pembangunan->

- tingkatkan-perekonomian-jateng
- Nuridin, N. (2016). Sampai Mei, Kunjungan Turis Ke Jateng Tercatat 11.79 Juta. *Kompas.Com*. Retrieved from <https://travel.kompas.com/read/2016/08/11/151000827/Sampai.Mei.Kunjungan.Turis.ke.Jateng.Tercatat>
- Pertiwi, N. L. G. A. (2014). Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Retribusi Obyek Wisata dan PHR Terhadap PAD Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal EP Unud*, 3(3), 115–123.
- Pratitits, W. D., & Listyani, E. (2016). Perbandingan Metode Estimasi- S dan Estimasi-MM Pada Model Regresi Robust Untuk Memprediksi Produk Kedelai Di Indonesia. *Jurnal FMIPA, Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Prihartini, F. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran, Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(3), 12–20.
- Purwanti, N. D., & Dewi, R. M. (2014). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006-2013. *Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya*, 2(3), 1–12.
- Rokhmanasari, L. A. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PAD di Kabupaten Batang dan Kabupaten/Kota Pekalongan*.
- Santosa, P. budi, & Rahayu, R. P. (2005). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Faktor-Faktor. *Jurnal Dinamika Pembangunan*, 2(1), 9–18.
- Saputra, Y. (2019). Kunjungan Wisman Di Jateng Turun 13,37% Ini Penyebabnya. *Semarangpos.Com*. Retrieved from <https://www.solopos.com/kunjungan-wisman-di-jateng-turun-1337-ini-penyebabnya-969717>
- Suastika, I. G. Y., & Yasa, I. N. M. (2017). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Lama Tinggal Wisatawan, dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP UNUD*, 6(7), 1332–1363. <https://doi.org/E-Jurnal EP Unud>
- Susanto, I. (2014). Analisis Pengaruh PDRB, Penduduk, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Kota Malang Tahun 1998 – 2012). *Jurnal Ilmiah*, 2(2), 1–16.
- Triani, & Kuntari, Y. (2010). Pengaruh Variabel Makro Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Periode 2003-2007 di Kabupaten Karanganyar". *Jurnal Ilmu Ekonomi ASET*, 12(1), 1–16.
- UU No.28 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Widyaningsih, P., & Budhi, M. K. S. (2014). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal EKonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 3(4), 155–163.